

PENGUKURAN KONSTRUK KEMISKINAN DI INDONESIA

THE MEASUREMENT OF POVERTY CONSTRUCT IN INDONESIA

Istiana Hermawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial no. 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia

Telp 0274-377265 (HP 085228716070)

Email: istiana1410@gmail.com

Naskah diterima 14 September 2017, direvisi 8 Oktober 2017, disetujui 4 November 2017

Abstract

This research was conducted to find the concept and indicators of poverty in Indonesia. It based on the underlying assumptions the indicators have been used tend to be economic nuances, by using income as the only indicator the result of implementation of poverty alleviation program are less optimal. This research uses a mix approach by combining quantitative and qualitative approach. Research sites in 34 provinces using rural and urban community settings. The research of population is all registered poor families and unregistered. Sampling techniques using multi stage random sampling that is for every province represented by one town and one regency, every town/regency were represented by five district respectively and each sub-district represented by 120 respondents, so the research involved 68 cities/regency, 340 districts and 40.775 respondents. Data collection techniques used were questioners, in depth interviews and focus group discussion. Descriptive quantitative data is processed using SPSS version 17.00 for Windows program and for poverty constraint measurement using Confirmatory Factor Analysis (CFA) with LISREL 8.4 programs. Qualitative data are for descriptively interpretative analysis. The results of the research show that a poverty is defined as a condition that describes the powerless/inability/obstacles experienced by the family, whether economically, socially, psychologically, culturally or politically in realizing a decent human life. Based on the measurement of poverty construct, it can be concluded that poverty in Indonesia has been successfully represented significantly by its five indicators, that of social ($\lambda=0,78$), psychology ($\lambda=0,77$), culture ($\lambda=0,72$), economy ($\lambda=0,66$) and politic ($\lambda=0,46$). The result strengthen the argument that poverty in Indonesia is characterized of multidimensions. Based on research result. It is recommended to the Ministry of Social Affairs as a responsible institution in the implementation of social welfare in Indonesia to establish clear, measurable and comprehensive poverty indicators that can be used as policy reference in determining the right targets and poverty allevation program which is relevant.

Keyword: Measurement, Constraints, Indicator, Poverty.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang tepat di Indonesia. Asumsi yang mendasari karena indikator yang selama ini digunakan cenderung bernuansa ekonomi dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator, sehingga dengan penggunaan variabel tunggal tersebut, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan hasilnya kurang optimal. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan (*mix approach*), yaitu dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 34 provinsi dengan menggunakan *community setting* pedesaan dan perkotaan. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin yang teregister dan yang tidak teregister. Teknik sampling menggunakan *multi stage cluster random sampling* yaitu untuk setiap provinsi ditentukan satu kota dan satu kabupaten, setiap kota/kabupaten ditentukan lima kecamatan, setiap kecamatan ditentukan 120 responden, sehingga penelitian ini melibatkan 68 kota/kabupaten, 340 kecamatan dan 40.775 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan

questioner, wawancara mendalam (*In depth interview*), dan *Focused Group Discussion*. Data kuantitatif yang bersifat deskriptif diolah menggunakan program SPSS versi 17.00 for Windows dan untuk pengujian kontrak kemiskinan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* dengan program LISREL 8.4. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemiskinan dimaknai responden sebagai kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga, baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Berdasar pengujian kontrak kemiskinan diperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yaitu sosial ($\lambda=0,78$), psikis ($\lambda=0,77$), budaya ($\lambda=0,72$), ekonomi ($\lambda=0,66$), dan politik ($\lambda=0,46$). Hasil penelitian ini menguatkan kesimpulan, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk menetapkan indikator kemiskinan yang jelas, terukur dan komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan dalam menetapkan sasaran yang tepat dan program pengentasan kemiskinan yang relevan.

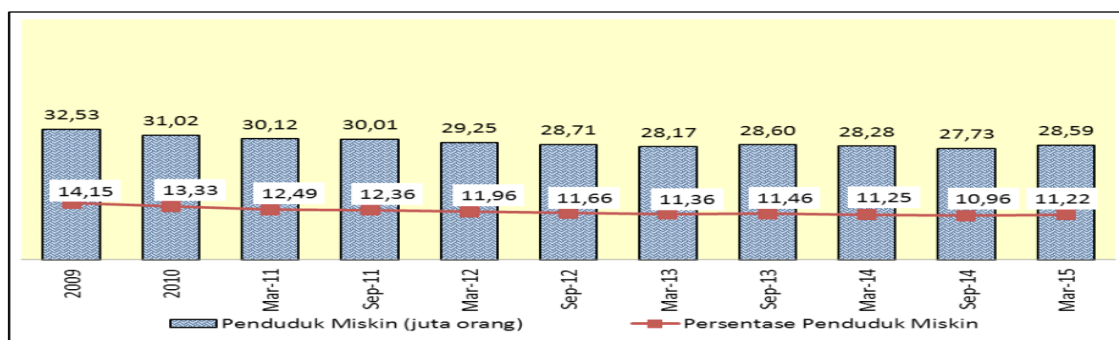
Kata Kunci: Pengukuran, Konstrak, Indikator, Kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS, beberapa tahun terbitan) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2009-2015 dapat disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut.

Kemiskinan banyak sekali didefinisikan oleh para ahli dengan titik tekan masing-masing. Menurut Saunders dan Matheson (1992 dalam Sri Widayanti, 2015:16) perbedaan pandangan dan perdebatan seputar persoalan kemiskinan di antara para peneliti sosial terletak pada fokusnya. Pertama, mereka yang menekankan pada ukuran kemiskinan dan kedua mereka yang

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2009–2015



Sumber: BPS

Gambar. 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia.

Dengan menyimak data pada Gambar 1 di atas dapat disimpulkan, bahwa angka kemiskinan penduduk Indonesia relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2015 terlihat ada peningkatan penduduk miskin dari 27,73 juta jiwa (10,96%) pada periode September 2014 menjadi 28,59 juta (11,22%) pada periode Maret 2015. Kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2015 ini diduga karena beberapa faktor, seperti kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta naiknya beberapa bahan kebutuhan pokok yang dirasakan sangat memberatkan warga masyarakat.

menempatkan pada penempatan kemiskinan dalam konteks keadilan secara lebih luas untuk memahami penyebab dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Secara umum, pandangan pertama diusung oleh para ahli ekonomi (*measurers*) dengan menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sedangkan pandangan yang kedua diusung oleh ahli sosial (*explainers*) yang cenderung menggunakan pendekatan multidimensional (*multidimensional approach*).

Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) menekankan aspek

ekonomi dalam melihat kemiskinan. Artinya, kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, kerangka dan metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah 'garis kemiskinan' (*poverty line*) yang pada awalnya ditentukan setara dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak (Saunders, 2005:19). Ukuran kemiskinan dengan *poverty line* ini sangat terkait dengan dua konsep yaitu kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relative (*relative poverty*). Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, tempat berlindung dan pakaian (Townsend, 1970 dalam Seer, 2006: 52).

Dalam praktiknya, *basic needs approach* banyak diterapkan oleh lembaga internasional seperti *World Bank* dan juga lembaga pemerintah seperti Biro Pusat Statistik. Kemiskinan menurut *World Bank* adalah kelaparan, kekurangan perlindungan, sakit tetapi tidak mampu pergi ke dokter, ketidakmampuan mendapatkan pendidikan sekolah dan tidak bisa membaca, tidak punya pekerjaan, kekhawatiran menghadapi masa depan, kehilangan seorang anak karena ketiadaan air bersih, serta ketidakmampuan, kurangnya keterwakilan dan kebebasan. Dengan konsep kemiskinan tersebut, *World Bank* menetapkan garis kemiskinan absolut sebesar 1 US\$ dan US\$ PPP (*purchasing power parity* atau paritas daya beli) per hari dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antarnegara/ antarwilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilaikemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global/internasional. Angka konversi paritas daya beli adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika Serikat (Bappenas, 2010: 15).

Lebih lanjut Bappenas (2010) menyebutkan, bahwa Biro Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kemiskinan. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari

2.100 kalori per kapita per hari. Dengan demikian orang dikatakan miskin apabila tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang bersifat mendasar.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan sudah lama dilakukan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) UUD 45, yang mengamanatkan semua Warga Negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari kemiskinan, dan keterlantaran, 2) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta 3) Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Di samping regulasi, berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah digulirkan oleh pemerintah.

Fakta menunjukkan, bahwa hingga saat ini tidak semua keluarga miskin dapat mengakses berbagai program layanan pemerintah, karena pada umumnya mereka tidak terdaftar sebagai keluarga miskin. Salah satu penyebab tidak terdatanya sejumlah keluarga miskin oleh pemerintah, karena mereka dianggap tidak sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan. Ini berarti, bahwa terdapat indikator yang tidak dapat menjangkau mereka sebagai keluarga miskin, seperti pengemis dan gelandangan yang tidak mempunyai kartu identitas, orang dengan disabilitas yang minim pengetahuan, dan lain-lain.

Sejumlah indikator kemiskinan yang dikemukakan berbagai pihak menunjukkan cara pandang yang berbeda, yaitu: 1) Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Beliau membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dengan perkotaan. Untuk daerah perdesaan, jika seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedang untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun, 2) Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan melalui tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa

BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998, yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan, melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan, 3) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survai BPS menggunakan rumah tangga, sedang BKKBN menggunakan keluarga, 4) Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan ukuran kemiskinan atas dasar *Human Poverty Index (HPI)* atau Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang fokus pada tiga dimensi manusia, yakni usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Untuk mengukur dimensi ini digunakan indikator kemungkinan seseorang meninggal sebelum berumur 40 tahun, persentase penduduk yang tidak bisa baca-tulis, dan rendahnya kualitas hidup. Rendahnya kualitas hidup diukur dengan persentase penduduk tanpa akses pada sarana air bersih, persentase penduduk tanpa akses ke pelayanan kesehatan, dan persentase anak di bawah lima tahun yang kekurangan gizi.

HPI ini dikembangkan PBB untuk melengkapi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan kualitas atau standar hidup di suatu negara dibanding negara yang lain. Laporan Pembangunan Manusia atau yang sering disebut *Human Development Report (HDR)* dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mengembangkan model ini. *HDR* yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 menjadikannya sebagai model pembangunan nasional dengan sebutan "Pembangunan Manusia Seutuhnya".

Sejumlah indikator yang dikemukakan berbagai pihak, ternyata perlu disempurnakan, sehingga dapat menjadi alat yang tepat untuk memotret dan mengukur kemiskinan beserta fenomenanya. Kementerian Sosial RI sebagai

lembaga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia merasa perlu untuk merumuskan Konsep dan Indikator Kemiskinan yang komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan. Hal ini penting mengingat keluarga miskin yang menjadi sasaran program Kementerian Sosial memiliki karakter permasalahan kesejahteraan sosial yang spesifik.

Multidimensional approach menekankan, bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensional, yang tidak hanya disebabkan oleh ada atau tidak adanya satu faktor saja melainkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi (Saunders, 2005:17). Studi kemiskinan harus diletakkan dalam konteks ketidakadilan sosial ekonomi dalam struktur, proses, kebijakan dan nilai-nilai yang mendasarinya (Saunders & Matheson (1992); Hikam (2000), dan Mullaly (2002).

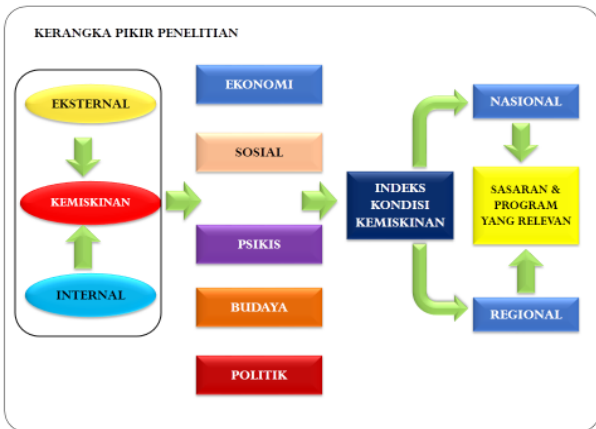
Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan dilihat sebagai masalah multidimensional. Artinya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakberdayaan yang dialami keluarga, baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Dengan bertitik tolak dari konsep ini, maka kemiskinan memiliki lima dimensi yaitu ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah konsep kemiskinan menurut perspektif sasaran dan *stakeholder*? (2) Apakah indikator ekonomi, sosial, psikologis, budaya, dan politik merupakan konstruk yang tepat untuk mengukur kemiskinan?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep dan indikator kemiskinan yang tepat yang akan dijadikan Kementerian Sosial sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Asumsi yang mendasari adalah karena konsep dan indikator yang ada belum lengkap (cenderung bernuansa ekonomi), dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator, sehingga kurang mencerminkan fenomena kemiskinan yang majemuk atau

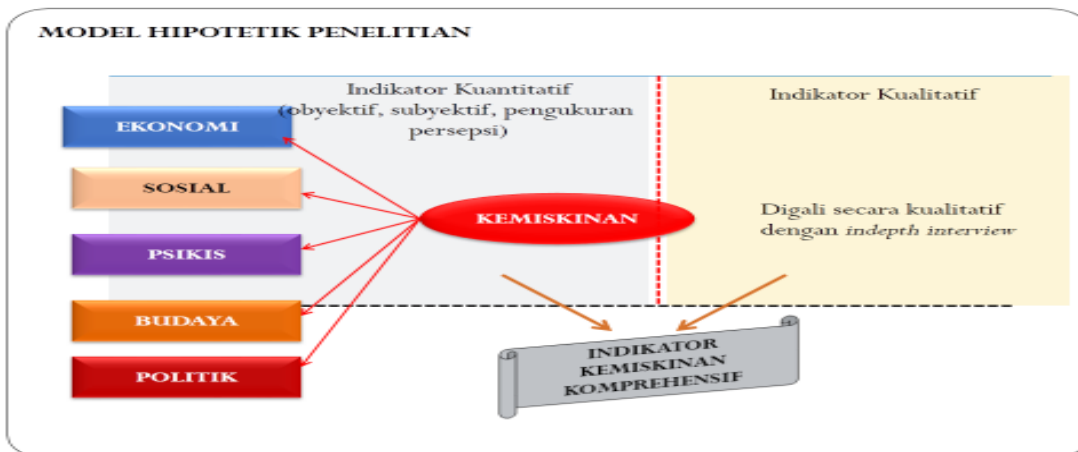
multidimensi. Penggunaan variabel tunggal dalam program pengentasan kemiskinan menyebabkan program yang dilaksanakan hasilnya kurang efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan penelitian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan lima dimensi kemiskinan, yaitu sosial, psikis, budaya dan politik untuk diuji apakah kelima dimensi ini merupakan konstrak indikator yang membentuk kemiskinan di Indonesia. Melalui penelitian ini selain dapat ditemukan konsep kemiskinan dan indikator kemiskinan makro (nasional); juga dapat ditemukan indikator kemiskinan lokal, yang dapat dijadikan acuan dalam pengentasan kemiskinan pada level nasional dan regional (lokal).

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar. 2. Kerangka Pikir Penelitian

Sedangkan model hipotetik terkait pengujian konstrak kemiskinan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar. 3. Model Hipotetik Penelitian

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (*mix approach*). Dengan pendekatan ini, tingkat kemiskinan dan konstrak kemiskinan bisa diukur dan fenomena kemiskinan yang bersifat spesifik bisa digali. Melalui penelitian ini selain dapat ditemukan konsep kemiskinan dan indikator kemiskinan makro (nasional); juga dapat ditemukan indikator kemiskinan lokal, yang dapat dijadikan acuan dalam pengentasan kemiskinan pada level nasional dan regional (lokal).

Penelitian ini melibatkan semua provinsi di Indonesia (34 Provinsi) sebagai lokasi penelitian dan menggunakan *community setting* wilayah administrasi, yaitu *setting* daerah perkotaan dan perdesaan. Setiap provinsi diambil 1 sampel kabupaten sebagai representasi wilayah perdesaan dan 1 sampel kota sebagai representasi wilayah perkotaan. Masing-masing kota/kabupaten diambil 5 kecamatan sebagai sampel penelitian, sehingga terdapat 68 kota/kabupaten dan 340 kecamatan di Indonesia yang dilibatkan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang teregister (penerima layanan program pemerintah (Raskin, Program Indonesia Pintar/pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat/Pemegang Kartu Indonesia Sehat, Program Indonesia Sejahtera/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jamkesda, dan sebagainya) dan keluarga miskin yang tidak teregister. Teknik sampling yang digunakan adalah *Multi Stage Cluster Random Sampling*

(untuk setiap provinsi ditentukan 1 kota dan 1 kabupaten, dan setiap kota/kabupaten ditentukan 5 kecamatan sebagai sampel penelitian). Setiap kecamatan dilibatkan 6 petugas pengumpul data dan masing-masing petugas akan mengumpulkan data sebanyak 20 responden (keluarga miskin), dengan catatan 18 orang adalah responden yang terregister dan 2 responden yang tidak terregister. Dengan demikian setiap kota/kabupaten melibatkan 600 responden (dengan rincian 540 responden yang terregister dan 60 responden yang tidak terregister), sehingga penelitian ini adalah sebanyak 40.800 responden. Sampel penelitian (responden) ditentukan secara acak/*random*. Dalam penelitian ini ternyata ada 45 data (0,11%) yang rusak/tidak dapat dianalisis, sehingga sampel penelitian keseluruhan sebesar 40.775 responden dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 161.772 jiwa.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: angket/kuesioner, panduan wawancara, dokumentasi dan lembar pengamatan. Setelah model penelitian dampak pengentasan kemiskinan beserta instrumen dan perangkatnya disusun, kegiatan dilanjutkan validasi oleh para ahli (*expert judgement*). Validasi pakar (*expert judgement*) ini melibatkan 30 pakar dari lintas profesi dan lintas disiplin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah *questioner*, wawancara (*In depth interview*) dengan berpedoman pada panduan wawancara (*interview guide*) juga *Focused Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) dan telaah dokumen.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini yang bersifat kuantitatif untuk menggambarkan deskripsi sasaran/persebaran data penelitian diolah secara komputasi dengan menggunakan bantuan program *Excel* dan program statistik *SPSS* versi 17.00 *for Windows*. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan analisis statistik inferensial dan untuk pengujian konstruk kemiskinan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* dengan bantuan program LISREL 8.4. Adapun strategi pemodelan yang dipilih *Strictly Confirmatory* atau *Confirmatory Modelling Strategy* (pengujian dilakukan untuk

menerima atau menolak model, jadi tidak ada repesifikasi model) (*Joreskog & Sorbom, 1993; Hair et al, 1995*). Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan kemudian diberi makna (*interpretative*), dengan cara mereduksi data (pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar) sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dideskripsikan dan diberi interpretasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut perspektif orang miskin adalah kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dimaknai sebagai ketiadaan pekerjaan/keterbatasan peluang kerja, ketidakpastian penghasilan, keterbatasan keahlian/keterampilan, keterbatasan aset/modal serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sanitasi yang sehat seperti air bersih dan lingkungan yang sehat, serta fasilitas kredit untuk pengembangan usaha. Sedangkan konsep Kemiskinan dalam perspektif stakeholder merujuk pada pengertian kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendefinisikan kemiskinan dari aspek sumber daya manusia, faktor pendidikan, etos kerja yang rendah atau malas, dan faktor alam yang memungkinkan seseorang menjadi miskin.

Konsep kemiskinan dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Dengan demikian kemiskinan dalam konteks penelitian ini memiliki lima dimensi yaitu ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik.

2. Pengujian Konstrak Kemiskinan

Hasil pengujian model konstrak (dengan teknik *confirmatory factor analysis*) menunjukkan,

bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik. Data selengkapnya dari hasil pengujian konstrak indikator kemiskinan nasional berdasarkan sembilan parameter *goodness of fit index model* dapat disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

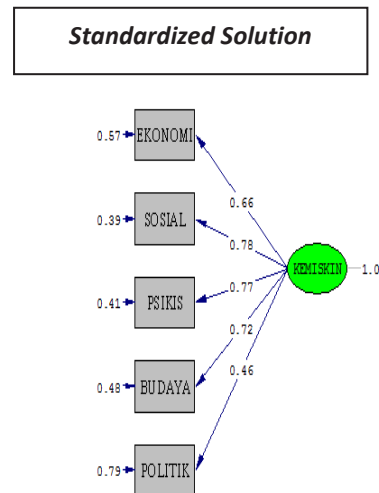
Tabel 1. Goodness of Fit Index Model Indikator Kemiskinan Nasional

No	Index	Batas Nilai	Hasil	Tingkat Kecocokan
1	Chi Square (χ^2) dan Probabilitas (p)	Kecil & $P > 0,05$	2236,67 $P = 0,00$	Kurang Baik
2	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	$\leq 0,08$	0,10	Kurang Baik
3	Normed Fit Index (NFI)	$\geq 0,90$	0,97	Baik (good fit)
4	Non Normed Fit Index (NNFI)	$\geq 0,90$	0,95	Baik (good fit)
5	Comparative Fit Index (CFI)	$\geq 0,90$	0,97	Baik (good fit)
6	Incremental Fit Index (IFI)	$\geq 0,90$	0,97	Baik (good fit)
7	Relative Fit Index (RFI)	$\geq 0,90$	0,95	Baik (good fit)
8	Goodness of Fit Index (GFI)	$\geq 0,90$	0,98	Baik (good fit)
9	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	$\geq 0,90$	0,94	Baik (good fit)

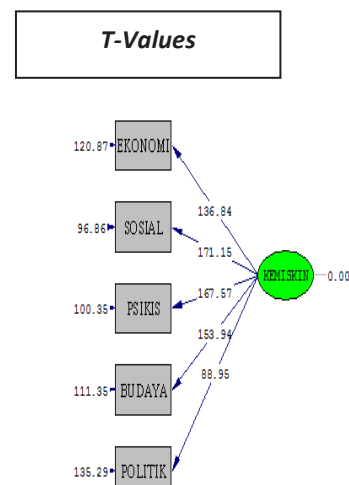
Mencermati Tabel 2 di atas, dengan menggunakan sembilan parameter yang merupakan kriteria *goodness of fit index model* yang dipakai dalam penelitian ini, terbukti tujuh parameter dapat memenuhi kriteria *goodness of fit index model*. Dengan terpenuhinya sebagian besar kriteria *goodness of fit index model* tersebut, maka berarti model yang dihipotesiskan dapat dinyatakan sesuai dengan data empirik. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *fit index* atau kecocokan model yang diuji adalah baik. Dengan kata lain, bahwa model yang diajukan mendapat dukungan kuat dari sampel untuk menjelaskan populasi yang ada. Maknanya, bahwa model indikator kemiskinan yang diajukan sangat tepat

untuk menjelaskan variabel pendukungnya yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik.

Visualisasi model konstrak indikator kemiskinan nasional dalam bentuk diagram *Basic Model Standardized Solution* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Basic Model Standardized Solution

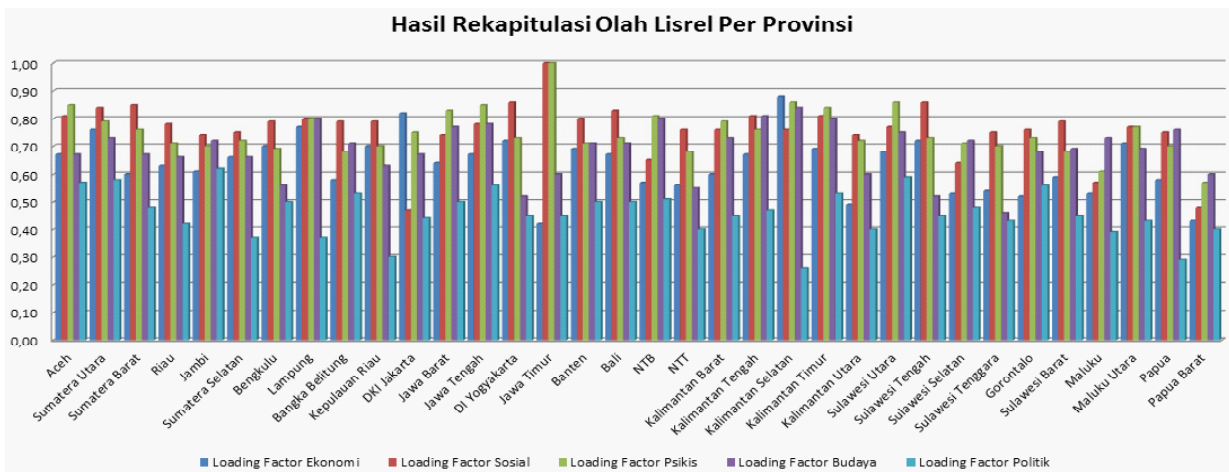


Gambar 5. T-Values Indikator Kemiskinan

Dari hasil pengukuran konstrak kemiskinan, terbukti bahwa empat variabel observer, yaitu sosial, psikis, budaya dan ekonomi memiliki kontribusi besar dalam membentuk kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya nilai muatan faktor standar untuk keempat variabel $\geq 0,50$. Menurut Igbaria et al (1991), suatu variabel dikatakan memiliki validitas yang baik terhadap konstrak apabila muatan faktor standarnya (*standardized factor loadings*) $\geq 0,50$. Dengan

demikian, empat dimensi dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik, karena muatan faktor standar dari dimensi ekonomi adalah sebesar 0,66, dimensi sosial sebesar 0,79, dimensi psikis sebesar 0,77 dan dimensi budaya sebesar 0,72. Sedangkan dimensi politik memiliki muatan faktor standar sebesar 0,46. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar dimensi memiliki kontribusi yang tinggi dalam membentuk kemiskinan karena memiliki muatan faktor standar ($\geq 0,50$). Ini berarti, bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik merupakan indikator yang tepat untuk mengukur konstrak kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menguatkan argumen, bahwa kemiskinan di Indonesia adalah multidimensi. Artinya, kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh banyak dimensi atau variabel, bukan semata-mata dipengaruhi oleh dimensi tunggal yaitu dimensi ekonomi saja. Penekanan kemiskinan pada dimensi tunggal, yaitu ekonomi akan mengakibatkan terjadinya distorsi pada dimensi yang lain. Rekapitulasi hasil uji lisrel per provinsi menunjukkan, bahwa di antara lima dimensi yang diuji, dimensi yang memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk kemiskinan di Indonesia adalah dimensi Sosial dan psikis. Sedangkan dimensi yang memiliki kontribusi terendah adalah dimensi politik.



Gambar 5. Muatan Faktor Standar Dimensi Kemiskinan Per Provinsi

Di antara keempat dimensi, dimensi sosial memiliki muatan faktor standar (λ) terbesar (0,78), menyusul dimensi psikis (0,77), dimensi budaya (0,72) dan dimensi ekonomi (0,66). Ini berarti, bahwa kemiskinan di Indonesia banyak dibentuk oleh keempat variabel observer tersebut. Adapun satu dimensi yang lain, yaitu dimensi politik diketahui memiliki pengaruh kecil terhadap konstrak kemiskinan nasional karena nilai muatan faktornya sebesar 0.46 atau di bawah 0.50. Kendatipun demikian, pengaruh dimensi ini terbukti positif. Ini berarti, bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik merupakan indikator yang tepat untuk mengukur konstrak kemiskinan di Indonesia.

Gambar 5 di atas menggambarkan, bahwa dilihat dari dimensi ekonomi, provinsi yang memiliki muatan faktor standar tinggi (≥ 70) ada sembilan provinsi yaitu Sumatra Utara (0,76), Bengkulu (0,70), Kepulauan Riau (0,70), DKI Jakarta (0,82), DIY (0,72), Kalimantan Selatan (0,88), Sulawesi Tengah (0,72), dan Maluku Utara (0,71). Ini berarti, bahwa di sembilan provinsi tersebut dimensi ekonomi memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam membentuk kemiskinan di Indonesia. Dimensi ekonomi dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk berbagai kebutuhan dasar manusia yang bersifat material seperti pangan, sandang, papan, perumahan, kesehatan dan sebagainya. Dalam kalimat lain, kemiskinan dari dimensi ekonomi diukur dari tingkat kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dilihat dari dimensi sosial, 29 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki muatan faktor standar tinggi (≥ 70). Muatan faktor standar di 29 lokasi ini berkisar antara 0,70 s.d 1,00. Ini berarti, bahwa di 29 provinsi tersebut dimensi sosial memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam membentuk kemiskinan. 3 provinsi yang memiliki muatan faktor standar sedang (0,51 s.d 0,69) adalah Maluku (0,57), Sulawesi Selatan (0,64) dan NTB (0,65) rendah (≤ 70). Adapun 2 provinsi yang memiliki muatan faktor standar rendah adalah Papua Barat (0,48) dan DKI Jakarta (0,47). Data ini menggambarkan, bahwa mayoritas kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh dimensi sosial. Dimensi sosial ini disamping diukur secara kuantitatif juga digali secara kualitatif dengan *in depth interview*.

Dilihat dari dimensi psikis, kemiskinan yang terjadi di 29 provinsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi psikis. Hal ini terlihat dari muatan faktor standar di 29 propinsi tinggi (≥ 70) atau berkisar antara 0,70 s.d 1,00 (Lihat Gambar 2). 5 provinsi yang memiliki muatan faktor standar sedang (0,51 s.d 0,69) adalah Bengkulu (0,69), Bangka Belitung (0,68), NTT (0,68), Maluku (0,61), dan Papua Barat (0,57). Data ini menggambarkan, bahwa dimensi psikis memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk kemiskinan di Indonesia. Dimensi ini terkait dengan sikap mental keluarga miskin yang fatalistik, apatis dan dependen pada bantuan pihak lain.

Dimensi budaya dapat ditunjukkan dari terlembaganya nilai-nilai yang menghambat

kehidupan sosial dan sebagainya. Dari 34 provinsi yang diteliti, 17 provinsi di antaranya memiliki muatan faktor standar tinggi (≥ 70) atau berkisar antara 0,72 s.d 0,84. Berarti, dimensi budaya memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kemiskinan di separuh provinsi yang ada di Indonesia. 16 provinsi yang lain memiliki muatan faktor standar dalam kategori sedang (0,52 s.d 0,69). Sedangkan satu propinsi yang memiliki muatan faktor standar rendah (0,46) adalah Sulawesi Tenggara.

Dilihat dari dimensi politik, kontribusi dimensi ini terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia dalam kategori sedang dan rendah. Artinya, meskipun dalam pengujian dimensi ini signifikan dalam membentuk kemiskinan, tapi kontribusi dimensi ini (tergambar dari muatan faktor standar) hanya berkisar antara 0,26 s.d 0,62. Ini berarti, bahwa meskipun secara politik orang miskin ini sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, diberi kemerdekaan untuk menyampaikan gagasan/aspirasi dan dilibatkan dalam penentuan program yang relevan, namun dalam kenyataannya hal itu kurang berdampak secara langsung terhadap kehidupannya sehingga mereka tetap berada dalam kondisi miskin. Orang miskin dalam kenyataannya tetap memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.

Hasil analisis deskriptif konstrak kemiskinan beserta indikator pembentuknya secara lengkap dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Konstrak Kemiskinan

Variabel Indikator	Σ Butir	Skor Hipotetik				Skor Empirik			
		Ter-rendah	Ter-tinggi	Rerata	SD	Ter-rendah	Ter-tinggi	Rerata	SD
Ekonomi	13	0	13	6,5	2,17	2	12	5,88	2,25
Sosial	12	0	12	6	2	2	8	5,59	2,50
Psikis	8	0	8	4	1,33	1	7	3,82	1,68
Budaya	8	0	8	4	1,33	2	8	3,78	1,59
Politik	4	0	4	2	0,67	2	4	1,98	0,78

seperti apatis, ketidakberdayaan, ketergantungan; terjerat dalam sistem ekonomi yang merugikan; terikat pada norma, adat dan nilai budaya yang menghambat; terjadinya disharmoni dalam

1. Dimensi Ekonomi

Dari hasil pengujian dimensi ekonomi sebagaimana tergambar pada Tabel 2 dapat

diketahui, bahwa skor rerata empirik ternyata lebih rendah daripada skor rerata hipotetik ($5,88 < 6,5$). Berdasar data empiris, 88,63% KK miskin memiliki skor di atas rata-rata empirik dan mendekati rata-rata hipotetik. Dengan demikian data ini dapat dimaknai, bahwa indikator yang digunakan dapat merepresentasikan kemiskinan dari aspek/dimensi ekonomi. Dari 13 butir pernyataan pada dimensi/indikator ekonomi apabila terpenuhi 6 butir, maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan kemiskinan secara ekonomi.

Delapan indikator dari dimensi ekonomi adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan kebutuhan pangan, (2) Kemampuan membeli pakaian, (3) Ketersediaan papan/tempat tinggal yang layak secara kemanusiaan, (4) Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, (5) Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, (7) Pemenuhan kebutuhan pekerjaan, (8) Ketersediaan sumber penghasilan, (8) Kepemilikan aset. Sedangkan 13 kriteria/parameter dari dimensi/indikator ekonomi meliputi:

- a. Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan minimal 2 kali sehari.
- b. Keluarga tidak dapat mengkonsumsi daging / ikan / telur minimal seminggu sekali.
- c. Keluarga tidak mampu membeli dua stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali.
- d. Keluarga tidak memiliki tempat tinggal dengan pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing (kamar tidur, dapur, dll).
- e. Keluarga tidak mampu menggunakan listrik (PLN/Non PLN) sebagai alat penerangan utama.
- f. Keluarga tidak menggunakan sumber air minum dari sumur/ledeng/PDAM/kemasan.
- g. Keluarga tidak memiliki jamban/WC untuk keperluan MCK.
- h. Kepala Keluarga hanya berpendidikan sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidiah (MI)/ sederajat.
- i. Kepala Keluarga hanya berpendidikan sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidiah (MI)/ sederajat.
- j. Keluarga tidak dapat membayar biaya berobat

di puskesmas/posyandu/rumah sakit ketika anggota keluarga ada yang sakit.

- k. Kepala Keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap baik di sektor formal maupun informal selama 3 bulan terakhir.
 - l. Penghasilan Kepala Keluarga per bulan di bawah UMR.
- m. Keluarga tidak memiliki tabungan dengan nilai 500 ribu/barang mudah dijual seperti seperti emas, sepeda motor, ternak, perahu/kapal motor atau barang modal yang lain.

2. Dimensi Sosial

Dari hasil pengujian deskriptif dimensi sosial dapat diketahui, bahwa skor rerata empirik dimensi ini ternyata lebih rendah daripada skor rerata hipotetik ($5,59 < 6$). Data empirik menunjukkan, bahwa 90,97% KK miskin memiliki skor di atas rata-rata empirik ($\geq 5,59$) dan mendekati rata-rata hipotetik, sehingga data ini dapat dimaknai bahwa indikator yang digunakan dapat merepresentasikan kemiskinan dari aspek/dimensi sosial. Dari 12 butir yang disajikan apabila terpenuhi 6 butir, maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan kemiskinan secara sosial.

Enam indikator dari dimensi sosial meliputi: (1) Keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan, (2) Kemudahan mengakses informasi, (3) Komunikasi antar anggota keluarga, (4) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (5) Keterlibatan dalam pengumpulan dana sosial/bantuan kemanusiaan, dan (6) Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial/publik (layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan air bersih, layanan terkait hak sipil sebagai WNI). Adapun 12 kriteria/parameter dari dimensi/indikator sosial meliputi:

- a. Keluarga tidak terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal.
- b. Keluarga tidak pernah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungannya.
- c. Keluarga tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial-kemanusiaan seperti menjenguk orang sakit, melayat, dan sebagainya.
- d. Keluarga tidak pernah berpartisipasi dalam

penghimpunan dana sosial seperti dana kematian, zakat, infak dan sebagainya di lingkungannya.

- e. Keluarga kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- f. Keluarga tidak terbiasa berkomunikasi/ berinteraksi secara baik dengan seluruh anggota keluarga.
- g. Seluruh anggota keluarga tidak pernah terlibat/ dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- h. Keluarga terhambat dalam menjalankan relasi sosial (komunikasi/silaturahmi dengan kerabat suami atau istri, tetangga, masyarakat).
- i. Keluarga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan pemerintah.
- j. Keluarga kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan yang disediakan pemerintah.
- k. Keluarga kesulitan dalam mengakses sumber air bersih, ledeng atau PAM.
- l. Keluarga kesulitan dalam mengakses layanan sipil dari pemerintah terkait hak pemenuhan sebagai Warga Negara Indonesia (pengurusan akte kelahiran, KTP dll)

3. Dimensi Psikis

Dari hasil pengujian deskriptif dimensi psikis dapat diketahui, bahwa skor rerata empirik dimensi ini ternyata lebih rendah daripada skor rerata hipotetik ($3,82 < 4$). Data empirik menunjukkan, bahwa 88,74% KK miskin memiliki skor di atas rata-rata empirik ($\geq 3,82$) dan mendekati rata-rata hipotetik, sehingga data ini dapat dimaknai, bahwa indikator yang digunakan dapat merepresentasikan kemiskinan dari aspek/dimensi psikis. Dari 8 butir yang disajikan apabila terpenuhi 4 butir, maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan kemiskinan secara psikis.

Enam indikator dari dimensi psikis meliputi: (1) Kebebasan menjalankan agama yang diyakini, (2) Pemenuhan rasa aman, bebas dari rasa takut, (3) Pemenuhan rasa percaya diri, (4) Pemenuhan lingkungan alam dan sosial yang sehat. (5) Pemanfaatan waktu luang secara bermakna, dan (6) Kemudahan memperoleh bantuan apabila membutuhkan. Adapun 8 kriteria/parameter dari dimensi/indikator psikis meliputi:

- a. Keluarga merasa tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakininya.
- b. Keluarga merasa tidak memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat
- c. Keluarga merasa ketakutan kehilangan pekerjaan.
- d. Keluarga merasa kurang percaya diri/pesimis dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
- e. Keluarga pasrah pada nasib/ tidak yakin dapat memperbaiki taraf hidup secara layak.
- f. Keluarga tidak dapat menikmati lingkungan alam yang bersih dan sehat.
- g. Keluarga merasa terhambat dalam menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat.
- h. Keluarga merasa tertekan karena kesulitan memperoleh bantuan dari teman, keluarga atau kerabat pada saat membutuhkan.

4. Dimensi Budaya

Dari hasil pengujian deskriptif dimensi budaya dapat diketahui, bahwa skor rerata empirik dimensi ini ternyata lebih rendah daripada skor rerata hipotetik ($3,78 < 4$). Data empiris menunjukkan, bahwa 78,39% KK miskin memiliki skor di atas rata-rata empirik ($\geq 3,78$) dan mendekati rata-rata hipotetik, sehingga data ini dapat dimaknai bahwa indikator yang digunakan dapat merepresentasikan kemiskinan dari aspek/dimensi budaya. Dari 8 butir yang disajikan apabila terpenuhi 4 butir, maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan kemiskinan secara budaya.

Tujuh indikator dari dimensi budaya meliputi: (1) Kebiasaan hidup bersih dan sehat, (2) Kepemilikan etos kerja, (3) Kebiasaan hidup hemat, suka menabung/ berinvestasi dan memiliki perencanaan dalam hidup, (4) Orientasi hidup ke masa depan, (5) Kemandirian/ketergantungan pada orang lain, (6) Kebebasan secara ekonomi, dan (7) Keterikatan dengan norma, adat, dan nilai sosial budaya. Adapun 8 kriteria/parameter dari dimensi/indikator budaya meliputi:

- a. Keluarga tidak memiliki kebiasaan hidup bersih dan sehat;

- b. Keluarga tidak memiliki etos kerja tinggi (malas dan tidak suka bekerja keras)
- c. Keluarga tidak terbiasa menabung
- d. Keluarga tidak terbiasa membelanjakan uang untuk kebutuhan yang paling mendasar.
- e. Keluarga tidak terbiasa untuk merencanakan kebutuhan keluarga
- f. Keluarga tergantung pada bantuan dari tetangga, kerabat atau pihak lain.
- g. Keluarga tidak terbebas dari kebiasaan meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang besar.
- h. Keluarga terikat dengan norma, adat, dan nilai sosial budaya yang menghambat.

5. Dimensi Politik

Dari hasil pengujian deskriptif dimensi politik dapat diketahui, bahwa skor rerata empirik dimensi ini ternyata lebih rendah daripada skor rerata hipotetik ($1,98 < 4$). Data empirik menunjukkan, bahwa 57,46% KK miskin memiliki skor di atas rata-rata empirik ($\geq 1,98$) dan mendekati rata-rata hipotetik, sehingga data ini dapat dimaknai, bahwa indikator yang digunakan dapat merepresentasikan kemiskinan dari aspek/dimensi politik. Dari 4 butir yang disajikan apabila terpenuhi 2 butir, maka dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan kemiskinan secara politik.

Empat indikator dari dimensi politik meliputi: (1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, (2) Penggunaan hak berpendapat melalui organisasi sosial/organisasi pemerintah, (3) Kesempatan/ peluang untuk memanfaatkan potensi/sumber daya yang ada, dan (4) Partisipasi dalam penentuan sasaran program layanan sosial/publik. Adapun empat kriteria/parameter dari dimensi/indikator budaya meliputi:

- a. Keluarga tidak pernah terlibat/tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat seperti pembuatan jembatan, jalan, pembuatan MCK dll.
- b. Keluarga tidak dapat menyampaikan aspirasi/ gagasan melalui organisasi sosial

atau organisasi pemerintahan yang ada di masyarakat.

- c. Keluarga tidak dapat memanfaatkan potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.
- d. Keluarga tidak pernah terlibat/dilibatkan dalam penentuan sasaran keluarga miskin yang akan mendapatkan program bantuan dari pemerintah, seperti Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan, dsb.

Di samping lima dimensi di atas, indikator/parameter kemiskinan lain yang dipertimbangkan Kementerian Sosial dalam penentuan sasaran program (keluarga miskin) menyangkut kondisi tempat tinggal (perumahan) dan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam keluarga. Indikator kondisi perumahan/ tempat tinggal meliputi lima parameter, yaitu:

1. Luas bangunan dengan luas lantai kurang dari $8m^2$ per orang.
2. Jenis lantai bangunan terbuat dari semen/ papan/kayu/bambu yang berkualitas rendah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Sumber air yang utama dari sumur/mata air tidak tertutup/sungai/air hujan.
5. Bahan baku untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

Sedangkan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam keluarga miskin meliputi 6 parameter, yaitu:

1. Anak usia balita (0-4 tahun) terlantar.
2. Anak usia sekolah (5-17 tahun) terlantar.
3. Penyandang disabilitas.
4. Lansia dalam kondisi sakit/lemah, baik secara fisik maupun psikis sehingga membutuhkan pelayanan khusus.
5. Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)
6. Penyandang penyakit kronis.

D. SIMPULAN

1. Simpulan

- a. Kemiskinan merupakan kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakberdayaan/

ketidakmampuan/hambatan yang dialami oleh keluarga baik secara ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Dengan demikian kemiskinan dalam konteks penelitian ini merujuk pada konsep multidimensi, yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik.

b. Kemiskinan di Indonesia adalah multidimensi. Berdasar pengujian konstrak kemiskinan diperoleh kesimpulan, bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil direpresentasikan secara signifikan oleh lima indikator pembentuknya, yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik. Hasil penelitian ini menguatkan argumen, bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak dimensi atau variabel, terutama variabel sosial, psikis dan budaya. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa dalam perumusan kebijakan, program atau intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, hendaknya mempertimbangkan dimensi kemiskinan yang multipel dan menggunakan indikator kemiskinan yang komprehensif, sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Aspek lokalitas yang ada di suatu daerah yang berkontribusi terhadap kemiskinan juga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah, karena pasti membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

c. Dimensi Kemiskinan berikut indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Dimensi ekonomi** (diukur dari aspek ketidakmampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar) memiliki 8 indikator dan 13 parameter. Apabila seseorang memenuhi minimal 6 dari 13 parameter yang dipakai, maka dapat dikategorikan miskin secara ekonomi.
- 2) **Dimensi Sosial**, memiliki 6 indikator dan 12 parameter untuk mengukur kemiskinan. Apabila seseorang memenuhi minimal 6 dari 12 parameter yang dipakai, maka dapat dikategorikan miskin secara sosial.

- 3) **Dimensi Psikis**, memiliki 6 indikator dan 8 parameter untuk mengukur kemiskinan. Apabila seseorang memenuhi minimal 4 dari 8 parameter yang dipakai, maka dapat dikategorikan miskin secara psikis.
- 4) **Dimensi Budaya**, memiliki 7 indikator dan 8 parameter untuk mengukur kemiskinan. Apabila seseorang memenuhi minimal 4 dari 8 parameter yang dipakai, maka dapat dikategorikan miskin secara budaya.
- 5) **Dimensi Politik**, memiliki 4 indikator dan 4 parameter untuk mengukur kemiskinan. Apabila seseorang memenuhi minimal 2 dari 8 parameter yang dipakai, maka dapat dikategorikan miskin secara politik.

Di samping menggunakan 31 indikator dan 45 parameter (yang merupakan penjabaran dari 5 dimensi kemiskinan, dalam menentukan sasaran program (keluarga miskin), juga perlu mempertimbangkan indikator/parameter kemiskinan yang lain, yaitu kondisi tempat tinggal yang menggambarkan secara fisik kemiskinan yang terjadi dan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam keluarga miskin.

2. Rekomendasi

a. Kepada Kementerian Sosial RI

- 1) Sebagai lembaga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial RI perlu menetapkan indikator kemiskinan yang jelas, terukur dan komprehensif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan dalam menetapkan sasaran yang tepat dan program yang relevan.
- 2) Program intervensi pengentasan kemiskinan hendaknya dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang mempengaruhi kemiskinan. Misalnya pemberian bantuan ekonomis produktif (untuk mengatasi kemiskinan ekonomi) dilaksanakan bersamaan dengan intervensi sosial (kemiskinan

sosial), intervensi untuk pengembangan sikap mental positif (kemiskinan psikis), intervensi budaya (kemiskinan budaya), pengembangan kesadaran kritis (kemiskinan politik).

- 3) Sampai saat ini banyak keluarga miskin yang tidak dapat mengakses berbagai program layanan pemerintah, karena pada umumnya mereka tidak terdaftar sebagai keluarga miskin. Salah satu penyebab tidak terdapatnya sejumlah keluarga miskin oleh pemerintah, karena mereka dianggap tidak sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan. Faktanya menunjukkan terdapat indikator yang tidak dapat mencakup mereka sebagai keluarga miskin, seperti pengemis dan gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas, orang dengan disabilitas yang minim pengetahuan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial perlu memberi kesempatan kepada mereka untuk mencapai standar hidup tertentu, seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dalam lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, dan pendidikan yang memadai.
- 4) Untuk mengentaskan masalah kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan secara lintas sektoral dengan pendekatan yang lebih integral dan komprehensif, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Demikian halnya dalam merencanakan program pembangunan, khususnya program pengentasan kemiskinan, hendaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi kemiskinan, baik dimensi ekonomi, sosial, psikis, politik, maupun budaya.
- 5) Pengujian konstruk kemiskinan dalam penelitian ini membuktikan, bahwa dimensi sosial, psikis budaya, ekonomi dan politik memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kemiskinan. Untuk memantapkan indikator-indikator kemiskinan yang ditemukan, Kementerian Sosial melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial perlu memfasilitasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Kepada Pemda/Instansi Terkait

- 1) Dalam mengidentifikasi sasaran dan mengembangkan program pengentasan kemiskinan di daerah, selain mengacu indikator dari BPS juga perlu dikembangkan indikator kemiskinan lokal yang ada, sehingga program yang dilaksanakan relevan, mendapat dukungan penuh dari sasaran dan berbagai pihak terkait serta memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam merumuskan indikator kemiskinan lokal di daerah.
- 2) Pengembangan program kemiskinan perlu mempertimbangkan lima dimensi (ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik) dengan penekanan pada dimensi kemiskinan yang menonjol di suatu daerah. Hal ini karena masalah kemiskinan yang dihadapi daerah sangat spesifik sehingga membutuhkan pendekatan, strategi dan intervensi yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain.
- 3) Perlu adanya sinergitas dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan di daerah, sehingga terdapat kesinambungan program.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Badan Penelitian SMERU, (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BKPKRI-BPSMERU.

- Bappenas. (2010). *Lapora Akhir: Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPs dan Keluarga Sejahtera/ KS-1*. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedeputan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- , (2003). *Penduduk Fakir Miskin 2003*. Jakarta: BPS RI dan Depsos RI
- Biro Pusat Statistik Indonesia, (2000a). *Pengukuran Tingkat Kemiskinan Di Indonesia 1976 – 1999 Metode BPS, Seri Publikasi Susenas Mini 1*, Jakarta: BPS
- , (2000b). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999 : Sebuah Kajian Sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2*, Jakarta : BPS
- , (2009-2015). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS
- Handler, Joel F. and Yeheskel Hasenfeld. (2007). *Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Houghton, J. and Shahidur R. Kandker. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC., USA: World Bank.
- Gybson and Scoot Rozelle. (2005). Price and unit values in poverty measurement and tax reform analysis. Sumber : *The World Bank Economic Review* Vol. 19 .Number 1 Tahun 2005 The Word Bank Journal.
- Hair. (1998). *Multivariat Data Analysis, 5th Edition*, Prentice-Hall International Inc.
- Joreskog, K. Sorbom, D (1993). *Lisrel 88: Struktural Equation Modeling With the Simplis Command Language*, Hillsdale, NJ: Scientific Software International.
- Keputusan Menteri Sosial RI nomor 146/HUK/2013 tentang *Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.
- Mullaly, B. (2002b). *Structural Social Work: Ideology, Theory and Practice*. Oxford University Press Canada.
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981 tentang *Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin*.
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*;
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2010 tentang *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota*
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*.
- Saunders, Petter & Matheson George. (1992). *Perseptions on Poverty, Income Adequacy and Living Standards in Australia*. Social Policy Research Centre: Report and Proccedings.
- Saunders, Petter. (2005). *The Poverty Wars*. Australia: UNSW Press Ltd.
- Serr, Klaus. (2006). *Thinking about Poverty*. Sidney: The Federations Press.
- Sri Widayanti. (2016). *Peran Faith Based Organization dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin. Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda dan Pesantren Al Imdad*. Jakarta: Disertasi Prodi Kesos FISIP UI.
- Strauss, J. Et all. (2004). *Indonesian living standards, before and after the financial crisis, evidence from the Indonesia Family life survey*. Singapore, California: RAND, ISEAS
- United Nation, (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington Dc: Oxfort University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

Negara RepublikIndonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235)